



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Juni 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.05 WIB s.d 14.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2021
Ketua Rapat	: Lasarus S.Sos., M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
Hadir Anggota	: Fisik 29 Orang dan Virtual 13 Orang (42 Orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah untuk membahas pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan RKP Tahun Anggaran 2021.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN/ BAPPENAS Nomor: S-376/ MK.02/ 2020 dan B.310/ M.PPN/ D.8/ PP.04.02/ 05/ 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF	SELISIH
1.	Kementerian PUPR	140.325.000.000	115.577.337.764	24.747.662.236

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2021 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, Program peningkatan SDM dan Program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2020

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**



BASUKI HADIMULJONO

KETUA RAPAT,



LASARUS